

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii
INTISARI	x
ABSTRACK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	13
1. Pengertian Perjanjian	13
2. Asas – Asas Perjanjian	14
3. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian	22
4. Pihak – Pihak Dalam Perjanjian	32
5. Berakhirnya Perjanjian	33
B. Tinjauan Tentang Asas Keseimbangan	34

1. Pengertian Asas Keseimbangan	35
2. Kedudukan Asas Keseimbangan Dalam Praktek Hukum	39
3. Aspek Dasar Pembuktian Ketidakseimbangan Dalam Asas Keseimbangan	41
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi	43
1. Pengertian Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi	43
2. Komponen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	46
3. Metode Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah	49
4. Bentuk dan Jenis Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa	51
5. Pihak – Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	52
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Sifat Penelitian.....	65
B. Jenis Penelitian	65
C. Teknik Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Penerapan Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pemberi Komitmen dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi dalam Pembangunan Infrastruktur KeretaApi Makassar - Pare-pare antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen.....	71

1. Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Makassar – Pare-pare	71
2. Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen	80
3. Kedudukan Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi.....	87
4. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi	90
B. Kendala Hukum yang Dihadapi dalam Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi dalam Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Makassar – Pare-pare dan Penyelesaiannya	98
1. Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum	98
2. Kendala Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.....	107
3. Penyelesaian Kendala Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	113
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	126